

“Kalau mesin sudah bisa memalsu segalanya, apa yang tersisa sebagai bukti bahwa sesuatu itu benar?”

Diskusi terbuka. Boleh kamu setuju, boleh kamu bantah — yang penting kamu pikir.

"Verifikasi sebagai Etika, Bukan Skill"

Pekan ini beredar peringatan agar publik tidak langsung mempercayai konten dakwah yang dihasilkan kecerdasan buatan, bersamaan dengan laporan maraknya penipuan lewat rekaman wajah palsu di ranah aset digital dan pengakuan sekelompok mahasiswa yang merasa kecanduan pada alat bantu cerdas. Ketiga fenomena ini kerap dibahas terpisah — yang pertama soal agama, kedua soal keamanan, ketiga soal psikologi. Namun bila diletakkan berdampingan, muncul satu pertanyaan yang mengikat ketiganya: ketika kemampuan memproduksi rupa

yang meyakinkan menjadi murah dan massal, apa yang masih bisa dijadikan pijakan untuk menyebut sesuatu "benar"? Persoalannya bukan lagi teknis semata; ia telah bergeser menjadi persoalan epistemik dan etis sekaligus.

Lensa pertama datang dari epistemologi. Selama berabad-abad, indra dianggap sebagai gerbang pengetahuan yang cukup andal: melihat berarti percaya, mendengar berarti membenarkan. Rekayasa audio-visual modern membongkar asumsi itu. Implikasinya, beban verifikasi berpindah dari indra ke rantai sumber — sesuatu dipercaya bukan karena terlihat, melainkan karena diketahui dari mana dan melalui siapa informasi itu sampai. Tetapi celah lensa ini nyata: tidak semua orang punya waktu, akses, atau kemampuan menelusuri rantai sumber, sehingga verifikasi berisiko menjadi privilese kelompok terdidik saja. Pertanyaan yang muncul: jika kebenaran hanya bisa diakses oleh yang punya sumber daya untuk memverifikasi, apakah ia masih layak disebut kebenaran publik?

Lensa kedua datang dari sosiologi informasi. Penyebaran kabar bukan tindakan individual, melainkan perilaku jaringan — sebuah konten menyebar karena ribuan orang memilih meneruskannya, sering kali demi status sosial, rasa peduli, atau ketakutan tertinggal. Implikasinya, titik intervensi paling efektif bukan pada produksi konten palsu, melainkan pada keputusan meneruskan. Menariknya, tradisi Islam menamai keputusan ini dengan istilah yang tajam: *tabayyun*, memeriksa sebelum bertindak, sebagaimana QS. An-Noor: 16 justru menegur mereka yang *ikut* memperkatakan berita bohong, bukan pembuatnya. Namun celahnya: menuntut setiap individu bertanggung jawab atas penyebaran mengabaikan bahwa arsitektur platform dirancang untuk memaksimalkan penyebaran, bukan ketelitian. Apakah adil membebankan seluruh tanggung jawab pada pengguna sementara sistemnya sendiri mengondisikan kecerobohan?

Lensa ketiga datang dari psikologi kognitif. Ketergantungan pada alat bantu cerdas dilaporkan menumpulkan nalar kritis; otak yang jarang dilatih berpikir mandiri cenderung menerima keluaran mesin sebagai kebenaran jadi. Implikasinya mengkhawatirkan: justru pada saat kemampuan verifikasi paling dibutuhkan, kapasitas untuk melakukannya sedang tergerus oleh alat yang sama. Dalam kerangka Islam, penjagaan akal — *hifz al-'aql* — adalah tujuan syariat yang setara pentingnya dengan penjagaan jiwa dan harta. Tetapi celah lensa ini: menyalahkan alat berisiko melupakan bahwa alat hanyalah pengganda kecenderungan yang sudah ada; manusia malas berpikir jauh sebelum ada mesin. Apakah masalahnya pada teknologi, atau pada budaya instan yang lebih tua dari teknologi itu sendiri?

Lensa keempat datang dari etika keutamaan. Alih-alih bertanya "bagaimana mendeteksi yang palsu", pendekatan ini bertanya "orang seperti apa yang tidak mudah tertipu". Jawabannya mengarah pada karakter: kejujuran yang mendarah daging membuat seseorang enggan menyebar yang belum ia pastikan, sebagaimana prinsip *shidq* yang oleh sabda Nabi ﷺ dikaitkan langsung dengan jalan menuju kebajikan. Implikasinya, benteng terbaik bukan perangkat lunak pendeteksi, melainkan disposisi moral. Celahnya: karakter tidak terbentuk instan dan tidak bisa diregulasi, sehingga solusi ini terasa lambat di hadapan ancaman yang bergerak cepat. Pertanyaan yang menggantung: mungkinkah masyarakat menumbuhkan keutamaan dalam skala dan kecepatan yang sepadan dengan laju rekayasa?

Pada tataran praktis, ada beberapa hal yang bisa dicoba mahasiswa dalam kesehariannya. Di ruang kuliah, biasakan menanyakan sumber primer setiap kali sebuah klaim disodorkan, termasuk klaim yang dihasilkan mesin — jadikan pertanyaan "dari mana ini" sebagai refleksi, bukan basa-basi. Di grup angkatan atau organisasi, terapkan aturan tak tertulis: kabar yang menyangkut nama baik seseorang tidak diteruskan sebelum dikonfirmasi. Saat memakai alat bantu cerdas untuk tugas, wajibkan diri menjelaskan ulang hasilnya dengan bahasa sendiri — bila tak mampu menjelaskan, berarti belum memahami, dan itu tanda akal

sedang dilewati, bukan dilatih. Di kos atau lab, sesekali matikan alat dan selesaikan satu persoalan murni dengan nalar sendiri, sebagai latihan menjaga otot berpikir tetap kuat.

Yang penting bukan menemukan satu jawaban final atas krisis kebenaran ini. Yang penting adalah menyadari bahwa lensa apa pun yang dipilih sebagai prioritas — memperbaiki sumber, memperbaiki sistem, memperbaiki akal, atau memperbaiki karakter — selalu meninggalkan celah yang harus ditutup lensa lain. Verifikasi, pada akhirnya, mungkin bukan sekadar keterampilan yang bisa diunduh, melainkan sikap hidup yang harus dirawat.

| Pertanyaan

Q · 01

Bukankah ini masalah regulasi platform, bukan tanggung jawab pengguna individual? Kenapa kita yang disuruh hati-hati?

A

Sebagian benar — arsitektur platform memang dirancang untuk memaksimalkan penyebaran, dan regulasi memang perlu. Tapi menunggu regulasi sempurna sambil terus menyebar ceroboh adalah pelarian. Tanggung jawab sistem dan individu tidak saling meniadakan; keduanya berjalan bersamaan. Pemegang keputusan terakhir tetaplah tangan yang menyentuh tombol bagikan.

Q · 02

Kenapa harus membawa-bawa agama? Verifikasi kan konsep sekuler yang universal.

A

Betul bahwa verifikasi universal. Tapi menariknya, tradisi Islam sudah merumuskan tabayyun sebagai kewajiban moral, bukan sekadar tips praktis, empat belas abad lalu. Yang ditawarkan bukan klaim monopoli atas ide, melainkan motivasi yang lebih dalam: memeriksa bukan karena takut hoaks, melainkan karena menyebar dusta adalah dosa. Motif itu lebih tahan lama daripada sekadar kehati-hatian teknis.

Q · 03

Apa bedanya artikel ini dengan nasihat generik "jangan gampang percaya"?

A

Perbedaannya pada diagnosis. "Jangan gampang percaya" menaruh beban pada kewaspadaan sesaat. Artikel ini justru berargumen bahwa kewaspadaan sesaat tidak cukup, karena kapasitas berpikir kita sendiri sedang tergerus. Solusinya digeser dari "waspada" menjadi "rawat karakter dan akal" — sesuatu yang struktural, bukan momentan.

Q · 04

Saya sendiri sering pakai alat bantu cerdas untuk tugas, bahkan mungkin kecanduan. Apa saya munafik kalau setuju artikel ini?

A

Tidak. Menyadari ketergantungan justru langkah pertama yang jujur, dan itu lebih bernilai daripada menyangkalnya. Persoalannya bukan memakai atau tidak memakai alat, melainkan apakah nalar masih dilatih di selanya. Pakai alat untuk mempercepat pemahaman, bukan menggantikannya — bedanya tipis tapi menentukan.

Q · 05

Kalau semua orang di sekitar cuek soal verifikasi, apa gunanya satu orang saja yang teliti?

A

Secara jaringan, satu simpul yang menolak meneruskan kabar palsu memang tidak menghentikan seluruh arus. Tapi ia memutus satu jalur, dan sering kali memicu orang lain ikut berhenti. Perubahan norma sosial hampir selalu dimulai dari minoritas yang konsisten. Keteguhan yang tampak sia-sia hari ini adalah bibit norma baru esok.